

<https://doi.org/10.61648>

KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Educational Institutions in Indonesia

Widiyanti¹, Yuni Kartika², Fauzia Oktaviana³, Diki Ahmad Fauzi⁴,
Azkia Naufal Mufliyah⁵, Endah Ratna Sonya⁶

¹²³⁴⁵⁶Sosilogi, FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat

Pos-el: widiyanti.uinsgd@gmail.com¹, yunika9328@gmail.com²,
fauziaok20@gmail.com³, dikiahmad2801@gmail.com⁴,
azkiamufliyah@gmail.com⁵, endahratna.sonya@uinsgd.ac.id⁶

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : Mei 2024

Direvisi : 04 Juli 2024

Disetujui : 05 Juli 2024

Keywords:

Education, Institutions,
Organization

Kata kunci:

Pendidikan, Institusi,
Organisasi

ABSTRACT:

Salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi mutu pendidikan adalah organisasi atau lembaga penyelenggara pendidikan tersebut. Permasalahan ini berdampak pada proses manajemen pelatihan yang tidak efisien dan tidak efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana bahan pustaka dikumpulkan, bahan bacaan dan catatan diambil, serta bahan penelitian diolah. Pendidikan adalah proses praktik dan peristiwa seumur hidup yang melibatkan refleksi spontan dan sistematis. Hakikat pendidikan adalah mengeluarkan kecerdasan manusia (humanisasi).

ABSTRAK:

One factor that significantly influences the quality of education is the organization or institution providing the education. This problem has an impact on the training management process being inefficient and ineffective. The research method used is a qualitative descriptive method where library materials are collected, reading materials and notes are taken, and research materials are processed. Education is a lifelong process of practice and event that involves spontaneous and systematic reflection. The essence of education is to bring out human intelligence (humanization).

PENDAHULUAN

Keterbatasan sejarah menjadikan Indonesia memasuki era baru dengan makna yang sangat istimewa, yakni transisi pendidikan. Pada saat yang sama, dipahami bahwa pendidikan memerlukan organisasi baru dari waktu ke waktu, karena transisi dari administrasi pendidikan yang terpusat. Ketika kita mulai melaksanakan desentralisasi pendidikan, nampaknya kita akan lebih memperhatikan permasalahan pendidikan yang lebih sempit dibandingkan sebelumnya, meskipun desentralisasi pendidikan bukanlah tujuan akhir. Pada dasarnya pendidikan senantiasa mempunyai peran sebagai pelopor dan penguat kemajuan kehidupan bangsa dan masyarakat. Itulah sebabnya pendidikan sangatlah luas dan terbuka, seluas dan terbuka seperti kehidupan di dunia yang tidak mengenal batas.

Salah satu faktor yang secara signifikan mempengaruhi mutu pendidikan adalah organisasi atau lembaga penyelenggara pendidikan tersebut. Permasalahan pendidikan seringkali adalah lembaga dan organisasi pendidikan yang tidak efektif dalam menyelenggarakan program pendidikan dan memberikan layanan pembelajaran. Lalu mengapa? Karena masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan berharap mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Namun nyatanya hal tersebut tidak selalu tercapai sebagaimana mestinya, bahkan di kalangan masyarakat ada yang menerima pelayanan pendidikan

yang kurang baik seperti pengajaran di kelas yang dilakukan apa adanya.

Jika ditelaah melalui berbagai hasil penelitian, terlihat jelas bahwa buruknya pelayanan antara lain disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat, proses pembelajaran yang tidak efektif, keterampilan guru yang kurang profesional, organisasi pendidikan yang kaku dan kompleks, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kaku dan selalu mengontrol. campur tangan, kontrol eksekutif yang kuat, peran legislatif yang lemah, manajemen yang terpusat dan tidak efisien di departemen pendidikan yang ditandai dengan birokrasi yang kaku dan kompleks, tidak fleksibelnya fiskal, kontrol yang terfragmentasi, sistem organisasi sekolah yang kompleks, dan lain-lain.

Permasalahan ini berdampak pada proses pengelolaan pelatihan yang tidak efisien dan tidak efektif. Oleh karena itu, kualitas pendidikan buruk dan masyarakat merasa tidak puas dengan layanan pendidikan yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, menurut para ahli Dewan Pendidikan, perlu dilakukan pembahasan yang mendalam dan komprehensif melalui kajian yang luas untuk mencari solusi yang tepat bagi organisasi pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan yang efektif kepada masyarakat dan juga penguatan pendidikan sesuai dengan prinsip otonomi dan pemberdayaan masing-masing potensi terkait.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi kualitatif dengan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Organisasi Pendidikan

Desain organisasi pendidikan adalah proses untuk mengelola dan mengorganisasikan struktur dan fungsi dari sekolah, universitas, atau sistem pendidikan secara keseluruhan. Desain organisasi pendidikan melibatkan aspek seperti menciptakan struktur hierarki, mengelola peranan dan tanggung jawab dari para pemimpin dan guru, menciptakan sistem pengelolaan informasi dan komunikasi, menciptakan sistem pengembangan profesional, dan menciptakan sistem pengembangan kurikulum. Desain organisasi pendidikan dapat memperbaiki efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan, meningkatkan kualitas pelajaran, dan memperbaiki pelayanan pendidikan di sekolah dan universitas.

Dalam pengelolaan pendidikan yang desentralisasi, perencanaan organisasi pendidikan berfokus pada layanan yang diberikan kepada satuan pendidikan atau sekolah. Desain organisasi di provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah menggambarkan organisasi yang lebih berdaya. Untuk memperkuat organisasi pendidikan, terutama di tingkat satuan pendidikan, perlu dilakukan perubahan fundamental dalam organisasi yang

memperjuangkan pelayanan. Salah satu perubahan ini adalah perubahan dari pola birokratis sebagai pemberi petunjuk menjadi pola pelayanan yang menerima masukan (input) dengan mengukuhkan organisasi pendidikan sebagai lembaga pelayanan pendidikan secara profesional. Organisasi pendidikan yang diperlukan oleh pemerintah daerah adalah organisasi yang dapat memberikan layanan teknis administrasi dan fungsional untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Karakteristik pelayanan ini bertitik tolak sifat organisasi sekolah yang mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah dan menempatkan guru sebagai sumber daya profesional dan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan secara seimbang. Prinsip dari manajemen berbasis sekolah adalah otonomi sekolah yang menunjukkan adanya hak-hak otonomi bagi sekolah-sekolah dan pemberdayaan potensi sekolah. Dalam penyelenggaraannya, manajemen ini memperlihatkan secara jelas penerapan manajemen yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sebagai akibatnya, pendekatan birokratis dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan dalam memberikan layanan kepada sekolah sudah tidak relevan lagi.

Pelembagaan Pendidikan: Kumpulan Orang dan Otoritas

Dalam era globalisasi saat ini, pendidikan merupakan sebuah syarat untuk modernisasi yang sangat penting, dimana semua bangsa

berlomba-lomba meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas menyangkut berbagai aspek, baik manusia, fasilitas, maupun biaya. Untuk terselenggara dengan baik, individu, lembaga, struktur, sarana serta biaya harus menunjang. Lembaga sendiri telah lama dikenal karena manusia adalah makhluk social yang perlu melakukan kerjasama untuk dapat bekerja dengan baik. Ada berbagai batasan atau pandangan yang dikemukakan para ahli yang satu samalainnya memiliki komponen-komponen yang pada dasarnya ada dalam setiap pengertian atau batasan lembaga. Definisi berikut didasarkan pada lima fakta yang umum terdapat pada setiap lembaga:

1. Organisasi selalu berisi orang-orang,
2. Orang-orang tersebut saling terlibat dan melalui cara-cara tertentu mereka itu saling berinteraksi.
3. Interaksi-interaksi tersebut selalu dilakukan secara teratur atau ditentukan oleh sejenis struktur.
4. Semua orang dalam organisasi mempunyai tujuan-tujuan pribadi dan beberapa diantaranya itulah mendasari tindakan-tindakan mereka. Setiap orang mengharapkan bahwa partisipasi mereka dalam organisasi akan membantu mencapai tujuan-tujuan individual.
5. Interaksi-interaksi tersebut dapat juga membantu mencapai tujuan-tujuan yang memiliki keterkaitan yang mungkin berbeda dari tetapi berhubungan dengan tujuan-tujuan pribadi.

Pendidikan di Indonesia di nilai tertinggal dibandingkan dengan di Negara-negara Asia lain, seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Ketertinggalan itu diukur menurut komponen-komponen pendidikan seperti kurikulum, manajemen, tenaga kependidikan, kesiswaan, dan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum kita masih didominasi oleh substansi dan pendekatan lama yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sekarang. Manajemen pendidikan kita masih sangat tergantung pada pola-pola yang secara sentralistik diinstruksikan oleh pemerintah, dan belum secara jelas didasarkan atas realitas masyarakat yang riil. Tenaga-tenaga kependidikan kita, terutama yang di daerah-daerah masih menganut paham guru adalah pemilik dan penguasa pengetahuan dan kebenaran. Kegiatan belajar-mengajar masih didominasi oleh guru yang mengindoktrinasi berbagai informasi pengajaran.

Sistem pendidikan di Indonesia mungkin benar, tetapi perlu disadari bahwa kebijakan dalam bidang pendidikan dipengaruhi oleh selera para penentu. Namun, perlu diketahui bahwa selera penentu kebijakan juga dipengaruhi oleh Semangat Zaman (Zeitgeist) yang berkembang pada waktunya. Semangat Zaman ini dipahami sebagai paradigma yang mempengaruhi tata nilai dan tata hidup masyarakat dan membentuk sikap dan cara bertindak masyarakat terhadap realitas pada suatu masa tertentu.

Sebaliknya, realitas sosial pada masa tertentu membentuk sikap dan cara bertindak masyarakat serta mempengaruhi tata nilai dan tata hidup masyarakat sehingga terjadi perubahan pada tataran paradigmatik.

Tujuan Pelembagaan Pendidikan

Pendidikan bukanlah sebuah syarat formal untuk mendapatkan ijazah atau gelar kesarjanaan. Hakikat pendidikan terletak pada pendewasaan manusia, pengembangan diri, dan konstruksi kompetensi. Pendidikan merupakan proses yang bersifat instrumental untuk membantu seorang siswa mengembangkan dirinya menjadi manusia yang lebih dewasa atau matang. Pandangan ini didasarkan pada filsafat bahwa setiap individu manusia secara kodrati memiliki berbagai potensi diri. Segala potensi itu dapat dimekarkan atau diaktualisasi sesuai konteks sosial budayanya. Aktivitas pendidikan menstimulasi dan memfasilitasi perkembangan diri, baik menyangkut pengetahuan rasional, keseimbangan emosi dan afeksi, maupun kecakapan hidup. Dalam konteks itu, pendidikan memiliki fungsi pembebasan, yaitu pembebasan dari kepribadian yang belum matang atau yang belum dewasa. Agar fungsi pemanusiaan itu efektif siswa tidak boleh tergantung dari buku hafalan. Semua aktivitas belajar seorang siswa tidak akan ada manfaatnya kalau ia masih terpaku mati atau terus terkurung oleh buku-buku teks, catatan-catatan pelajaran, atau hafalan-hafalan yang ia miliki

menjelang ujian-ujian. Yang terpenting ialah kepribadian siswa.

Hakikat pendidikan, sebagaimana telah diuraikan, memerlukan lembaga-lembaga pendidikan untuk menjalankan aktivitas belajar-mengajar dalam konteks. Pertama, pemanusiaan seorang siswa harus berlangsung dalam konteks sosio-budayanya. Persepsi hidup, nilai-nilai, dan kearifan lokal dari masyarakatnya harus diambil kira-kira sebagai modal sosial yang tidak boleh diabaikan dalam proses pendidikan. Ini membuat pengembangan diri seorang siswa memiliki akar sosial dan budaya. Pendidikan tidak menghapus siswa dari konteks masyarakatnya, melainkan memperkaya dan menumbuhkan apa yang secara kodrati dan kultural sudah miliki. Kedua, pendidikan diselenggarakan untuk menjawab harapan masyarakat. Apabila harapan itu adalah pembebasan masyarakat dari buta aksara, maka penyelenggaraan pendidikan harus dikhususkan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk program-program seperti pengembangan teknologi dan kecakapan yang dibutuhkan masyarakat setempat, serta program tentang kajian dan penghayatan kearifan local. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan dirancang untuk menjawab masalah-masalah dan tantangan yang berkembang dalam masyarakat. Ini membebaskan masyarakat dengan meningkatkan generasi muda suatu

kultur baru yang bebas dari praktek-praktek ketidakadilan.

Dari sisi lain, Profesor Driyarkara menjelaskan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia muda. Dalam pengertian itu, pendidikan dimengerti sebagai proses membantu manusia muda untuk semakin menjadi manusia yang utuh dan sempurna. Menurut dia, manusia muda sudah merupakan manusia, namun belum sempurna dan masih perlu disempurnakan. Lewat pendidikanlah, proses membantu orang muda itu terjadi. Pendidikan yang berarti mengembangkan orang muda menjadi manusia penuh jelas menggandai bahwa kita memiliki gagasan tentang manusia penuh. Apa manusia penuh itu? Apa artinya manusia sempurna? Maka pendidikan tidak pernah lepas dari siapa manusia itu, tidak lepas dari gagasan tentang manusia.

Jika kita menyebut manusia penuh sebagai individu yang memiliki segi-segi keamanusiaan seperti segi kognitif, segi emosi, segi spiritual, segi moral, segi fisis, dan segi estetis, maka jelas pendidikan harus mengembangkan semua aspek itu secara menyeluruh. Jika kita melihat manusia penuh sebagai kesatuan badan dan jiwa, maka pendidikan berarti mengembangkan kesatuan itu. Oleh karena itu dalam pemanusiaan lembaga pendidikan khusus di Papua, kita harus menanya bagaimana pendidikan itu sendiri harus dirancang untuk orang Papua. Tentang pendidikan di Papua; titik berangkat untuk proses pendidikan ini sangat

berbeda dibandingkan dengan manusia bukan Papua, yaitu Indonesia, karena pandangan dasar filsafati tentang manusia di kalangan Papua lebih menekan aspek individualitas dalam kebertubuhannya di tengah kosmos/ alam lingkungan, sedangkan manusia Indonesia lebih cenderung menekankan kolektivitas. Artinya setiap manusia adalah bagian dari suatu kelompok

Humanisasi Pendidikan

Lembaga pengelola pendidikan dasar dan menengah di Papua mengalami kekacauan dalam beberapa dekade terakhir. Lembaga pengelola pendidikan swasta yang merancang sistem pendidikan dan standar kelulusan berdasarkan kendali mutu, mempunyai otonomi dan wewenang yang kecil, bahkan tidak mempunyai inisiatif. Badan administratif tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan standar minimum yang berlaku, namun standar tersebut diakui oleh negara. Sebaliknya, standar kelulusan dasar negara bagian tetap tinggi sebagai respons terhadap kebijakan negara yang mengatur sistem kurikulum. Ternyata lembaga eksekutif bisa menjalankan kebijakan pemerintah. Negara dapat menyatukan sistem, kurikulum, dan standar minimum standar pendidikan untuk memungkinkan lembaga pengelola pendidikan melaksanakan formalisasi pendidikan. Dalam beberapa kasus, sistem memberikan formalisasi dan keseragaman kepada guru sebagai praktisi pendidikan, dibandingkan menerapkan sistem dan

norma standar dalam pengajaran, pelatihan, dan pendisiplinan siswa di lembaga pemerintahan masing-masing. Hal ini mungkin memaksa Anda untuk belajar mematuhi.

Sayangnya, negara perlu mempersiapkan sistem yang lebih strategis yang mencakup buku-buku yang secara inheren mengandung aspek-aspek yang memberikan pengetahuan dan merangsang kreativitas guru dan siswa yang tidak dapat ditemukan dalam buku-buku yang disusun dan disediakan oleh negara. Pengembangan sistem kurikulum dan pengembangan infrastruktur pendidikan, termasuk guru atau kurang, hanyalah proyek, sehingga pelaporan akan dilanjutkan berdasarkan target periode dan biaya pemerintah untuk penerapan.

Keprihatinan lainnya adalah untuk memperhatikan isu-isu pokok otonomi khusus Papua, di antaranya: Buruknya kualitas sumber daya manusia di Papua. Menurut UNDP, angka ini merupakan yang terendah di antara provinsi lain di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penyakit yang terus menimpa dan membinasakan masyarakat Papua yang hidup di bawah standar. Permasalahan kedua adalah rendahnya tingkat partisipasi anak dan remaja dalam pendidikan. Pasalnya, masyarakat Papua memiliki akses terhadap pendidikan yang rendah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Misalnya, mari kita lihat sistem kurikulum. Apakah ada kurikulum yang tidak nyata dan tidak diciptakan

sebagai sarana humanisasi? Antonio Gramsci (Catatan Penjara) berpendapat bahwa melalui saluran dan model pendidikan yang dipaksakan oleh otoritas negara kepada warganya, ketika kita menciptakan hegemoni kekuasaan, kita memberi sinyal. Hegemoni melalui jalur budaya akan terus meluas, menjangkau seluruh penjuru kehidupan, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Cara berpikir dan bertindak masyarakat akan didominasi oleh apa yang dipaksakan oleh aparat sipil negara dan birokrat berupa kebijakan dan sistem pendidikan yang tidak mencakup kemanusiaan mereka sepenuhnya dan sepenuhnya serta bersifat represif.

Peran negara tidak lepas dari proses pendidikan. Negara mempertahankan kekuasaan melalui kebijakan kebudayaan, yang disalurkan melalui lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan memandu kemauan politik dan sistem kekuasaan dalam masyarakat. Biasanya hal ini tidak disadari di masyarakat. Namun, kekuasaan politik langsung sering kali ada dan meresap ke dalam sistem pendidikan baik secara obyektif maupun terang-terangan, subyektif atau tidak disadari, dan disebut sebagai 'kurikulum tersembunyi'.

Lebih lanjut, sayangnya, kurikulum yang ada di beberapa negara saat ini sering digunakan sebagai sarana indoktrinasi oleh pihak yang berkuasa. Pendidik dan masyarakat luas biasanya tidak menyadari peran kurikulum dalam

pembelajaran siswa. Menurut Bourdieu dan Passeron, setiap tindakan pendidikan yang bertujuan untuk mereproduksi kekuasaan adalah kekerasan simbolik yang sah. Kekuatan kekerasan ini muncul dari relasi kekuasaan nyata yang ditutupi oleh kekuasaan pendidikan.

Dalam dunia pendidikan, kurikulum seringkali dipandang sebagai persoalan teknis belaka. Tapi kalau kita bicara kurikulum sebenarnya yang kita bicarakan adalah dunia pendidikan dan sumber-sumber kekuatannya. Kurikulum adalah program dan isi suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk melaksanakan proses akumulasi pengetahuan antargenerasi dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang homogen, persoalan kurikulum kurang menjadi perhatian, namun dalam konteks masyarakat majemuk, kurikulum merupakan perebutan kekuasaan antara pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat. Kelompok masyarakat yang dominan mempertahankan kurikulumnya untuk mempertahankan dominasinya dalam sistem sekolah. Seluruh aspek kurikulum diselaraskan dengan proses domestikasi, sebuah proses yang menjinakkan dengan mematikan kreativitas dan menjadikan peserta didik menjadi “robot” yang sekadar menerima transmisi nilai-nilai budaya yang ada. Hasil dari proses domestikasi bukanlah pembebasan, melainkan kebodohan. Proses domestikasi dan kebodohan seringkali masih terkait dengan proses komersialisasi yang melahirkan

kapitalisme pendidikan. Pendidikan tidak ditujukan untuk kemaslahatan massa, namun untuk kemaslahatan ekonomi segelintir elite yang didukung birokrasi pendidikan. Meningkatnya komersialisasi pendidikan di seluruh dunia telah dicatat oleh Bourdieu sejak tahun 1992. Bourdieu mengingatkan dunia akan perjalanan kelam yang akan menimpa sektor pendidikan.

Bangkitnya neokonservatisme politik dan neoliberalisme ekonomi membawa keuntungan ekonomi bagi para penguasa modal, namun kinerja mereka berpotensi menghancurkan berbagai ikatan kelembagaan yang menopang masyarakat nasional.

Generasi muda Papua dibentuk melalui proses pendidikan melalui sistem pendidikan yang berkaitan dengan politik statisme. Dilihat dari sistem politik yang berlaku, sebenarnya tidak ada apa-apa kesalahan sistem pendidikan yang diterapkan. Hal ini tidak selalu diberikan di setiap negara yang berwenang dan di mana pun kesempatan untuk mengembangkan pemikiran kritis tentang kekuasaan. Jalur pelatihan digunakan mis sarana untuk mengarahkan kemana masyarakat seharusnya berpikir, sehingga memungkinkan terjadinya kekuasaan kemanusiaan manusia tidak tumbuh, apalagi berkembang.

Dengan demikian, pendidikan telah mengalami proses yang bukan lagi merupakan praktik yang beradab, Melainkan sebagai kepentingan politik di satu sisi dan kepentingan ekonomi di sisi lain. Oleh karena itu, ketika masyarakat memasuki koridor

pendidikan, maka mereka tidak akan menemukan proses intelijen memerdekakan umat manusia, namun malah masyarakat menjadi terasing dari lingkungan sosialnya. Pendidikan hanyalah sarana untuk mengisi kekosongan, apapun itu praktiknya sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari atau tidak; pelajari dulu dengan baik bagaimana menguasai penalaran dan mengembangkan keterampilan manusia, tetapi bagaimana caranya? Sekumpulan materi hafalan dimasukkan ke dalam botol kosong siswa sehingga dapat menaikkan nilai dan rapor yang bagus. Tak heran, nilai ideologi Ebtanas Murni (NEM) dan keahliannya Menghafal materi ala “kecerdasan hati-hati” dan “Yang Ingin Menjadi Jutawan” menjadi acuan dan ajang Kompetisi

SIMPULAN

Mengakhiri hal tersebut di atas, perlu kita pahami pandangan tentang pendidikan. Pendidikan adalah seluruh praksis kehidupan serta proses-proses peristiwa yang disertai refleksi baik spontan maupun sistematis. Esensi pendidikan adalah pencerdasan manusiawi yang memerdekakan (pemanusiaan). Pendidikan menghantar dan menolong peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan potensi-potensi dirinya agar menjadi manusia yang mandiri, dewasa, dan utuh; manusia merdeka sekaligus peduli dan solider dengan sesama manusia lain dalam ikhtiar meraih kemanusiaan yang semakin sejati,

dengan jati diri dan citra diri yang semakin utuh, harmonis, dan integral. Pendidikan bermekanisme belajar seumur hidup bersama sesama manusia dan semesta alam raya, sehingga peserta didik mempunyai sikap dasar “seluruh masyarakat dan semesta raya adalah sekolah, semua orang adalah guruku”. Pencerdasan yang memberdayakan tersebut mempunyai fungsi sangat khusus untuk rakyat miskin, agar tidak terus menerus menjadi mangsa para kaya dan kuasa. Maka dalam bidang pendidikan dan pengajaran maupun kurikulum pun kita perlu berpihak pada yang miskin sebab dalam konteks hubungan persaingan antara yang kaya-kuasa dan yang miskin-tertindas pendidikan dan pengajaran beserta kurikulum dan perangkat pendidikan lainnya akan mudah sekali bisa mengabdikan kepada kepentingan yang kaya-kuasa daripada yang miskin-tertindas. Selain itu, pencerdasan manusiawi sebagai laku pembudayaan yang memerdekakan lewat pendidikan juga perlu dilakukan terhadap seluruh kehidupan

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Tan, P. S. (2021). "KELEMBAGAAN PENDIDIKAN. *SOSCIED*, 4.2 , 110-117.
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Journal of Islamic Education*, 3.2, 197-208.

- Sarwadi, S. (2019). Dinamika Kelembagaan Pendidikan Islam Di Indonesia. *t Tuots: Jurnal Pendidikan Islam*, 112-143.
- Al Syaifullah, S. &. (2021). Relevansi Manajemen Kesiswaan Guna Menopang Kelembagaan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 1420-1428.
- Istiyani, D. (2017). Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. *. Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam*, 127-145.
- Sulaiman, R. (2016). Pendidikan Pondok Pesantren Institusionalisasi Kelembagaan Pendidikan Pesantren. *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, 148-174.
- Noor, W. (2018). Azyumardi Azra: Pembaruan pemikiran dan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia. *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 19-28.
- Anwar, A. (2016). Karakteristik pendidikan Dan Unsur-unsur Kelembagaan di pesantren. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 165-182.
- Pradikto, B. G. (2021). Penguatan Kelembagaan Pendidikan Nonformal Pada Masa Pandemi Covid-19: Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PKBM di Provinsi Bengkulu. *urnal Abdi Pendidikan*, 42-50.
- J. D. (2016). Personality and boredom proneness in the prediction of creativity and curiosity. *Thinking Skills and Creativity*, 22, 48–57. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2016.08.002>
- Tang, X., & Salmela-Aro, K. (2021). The prospective role of epistemic curiosity in national standardized test performance. *Learning and Individual Differences*, 88. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2021.102008>